

---

**PENGENTASAN KEMISKINAN PADA MASYARAKAT  
PERTAMBAKAN SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN KAWASAN  
STRATEGIS AGROPOLITAN  
(STUDI DI KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO)**

Isna Fitria Agustina

(Prodi Ilmu Administrasi Negara-FISIP-Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Jalan Mojopahit 666 B, Sidoarjo  
email: [isnaagustina@umsida.ac.id](mailto:isnaagustina@umsida.ac.id))

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan penerapan pengembangan kawasan strategis agropolitan di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan data deskriptif, dengan menggali informasi melalui wawancara, observasi serta telaah dokumen. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada beberapa faktor penting yang menunjukkan bahwa hasil pengembangan kawasan strategis agropolitan sebagai pendukung pengentasan kemiskinan masih kurang optimal. Hal ini terjadi karena beberapa faktor penyebab, diantaranya; pertama, sub-sistem seperti pengembangan sumberdaya pertanian dan komoditas unggulan, sarana dan prasarana umum, sosial maupun agribisnis yang diperlukan sebagai penopang maupun penunjang belum dilengkapi bahkan tidak disediakan oleh pemerintah daerah sampai pemerintahan desa di wilayah Jabon. Kedua, adanya faktor penghambat baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan belum memuaskan, komunikasi antara pemerintah kecamatan dengan masyarakat tidak terjadi secara berkala. Dari segi masyarakat adanya keterbatasan pengetahuan dan informasi tentang cara dan pemanfaatan sumberdaya sebagai alat pengentasan kemiskinan, hal ini terjadi karena tingkat pendidikan masyarakat masih rendah dan akses dalam proses pemenuhan pengetahuan dan informasi masih terbatas.

Kata kunci: kemiskinan, kawasan strategis, agropolitan, masyarakat pertambahan

## **REDUCTION OF POVERTY AMONG THE AQUACULTURE COMMUNITY AS AN EFFORT TO DEVELOP THE STRATEGIC AGROPOLITAN AREAS**

*(Study in Jabon District of Sidoarjo Regency)*

### **ABSTRACT**

*The purposes of this research described the implementation of the strategic development of the strategic agropolitan area in Jabon district Sidoarjo and described the factors that become an obstacle in the implementation of poverty alleviation social. This study used a qualitative method with descriptive data approach, to gather information through interviews, observation and document analysis. Data analysis is performed with data reduction, presentation and conclusion. The conclusion of this study emphasized that there are two important factors that indicate the results of the development of strategic areas agropolitan such as supporting poverty reduction is still less than optimal. This happens due to several factors namely sub-systems such as the development of agricultural resources and competitive commodities, public facilities and infrastructure, social and agribusiness are required for a support haven't been provided by the local government to the village administration in the region Jabon. Second the inhibiting factor both government and society itself. The services provided by the district governments do not make the people satisfied besides the communication between the government districts and communities do not occur regularly. In this case, their lack of knowledge and information on how the resource is used as a tool of social poverty alleviation. This happens because the level of public education remains low and access in the process of fulfilling the knowledge and information is still limited.*

*Keywords: poverty, strategic area, agropolitan, aquaculture community*

### **PENDAHULUAN**

Membahas kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia seakan tidak ada habisnya untuk dikaji. Berbagai faktor penyebab bermunculan dan cenderung terus berkembang, diantaranya kemiskinan yang dilihat dari dimensi sosial. Kemiskinan merupakan kondisi dimana masyarakat tidak mampu menaikkan taraf perekonomian karena terhalang oleh seseorang atau sekelompok orang maupun kebijakan pemerintah yang tidak mendukung keberadaan ekonomi masyarakat tersebut. Dimensi kemiskinan (Widodo, 2006:296) terjadi karena kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapat kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Widodo juga berpendapat bahwa kemiskinan terjadi karena adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan yang

---

tersedia. Perangkat kebijakan yang tidak sesuai dengan pengembangan kawasan, pada akhirnya tidak akan menyentuh terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, diantaranya sektor ekonomi yang muaranya pada semakin menjamurnya kemiskinan. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam menyediakan sarana dan prasarana umum untuk masyarakat, yang dipayungi dalam suatu sistem menyentuh segala akses pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut.

Pengembangan kawasan merupakan paparan komoditas perikanan berskala ekonomi di wilayah agropolitan, dimana wilayah tersebut dilengkapi dengan sarana prasarana yang dibutuhkan, kelembagaan, pengolahan/pemasaran, dan sektor lain yang menunjang perkembangan dari sentra komoditi tersebut. Konsep Agropolitan seringkali dipandang sebagai salah satu cara mengurangi kemiskinan dengan jalan menguatkan perekonomian masyarakat melalui upaya mengembangkan kawasan pertanian dan pertambakan. Keberhasilan pengembangan kawasan agropolitan tergantung pada pemanfaatan sumberdaya pertanian yang didalamnya termasuk pertambakan dan komoditi unggulan, pembangunan sarana prasarana umum, sarana prasarana agrobisnis, sarana prasarana sosial ekonomi serta pengembangan kelestarian lingkungan.

Seperti yang terjadi pada masyarakat pertambakan di pesisir pantai Kecamatan Jabon, dengan sarana dan prasarana jalan yang minim, hanya bisa dilewati dengan menggunakan perahu atau jalan setapak untuk sepeda angin atau motor, sarana kesehatan dan pendidikan yang memprihatinkan, hal ini menyebabkan potensi masyarakat setempat tidak akan bisa berkembang dan akan menambah jumlah penduduk miskin. Menurut Kusnadi (2009) melihat permasalahan yang banyak terjadi dalam masyarakat nelayan adalah; 1). Kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, 2). Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar sehingga mempengaruhi dinamika usaha, 3). Kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, 4). Kualitas sumberdaya masyarakat yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, 5). Degradasi sumberdaya lingkungan baik dikawasan pesisir, laut maupun pulau-pulau kecil dan 6). Belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis mencoba merumuskan permasalahan antara lain bagaimana penerapan pengembangan kawasan strategis agropolitan di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dan aktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Adapun tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan pengembangan kawasan strategis agropolitan di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo serta untuk mengetahui dan menjabarkan

---

faktor penghambat pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

## **LANDASAN TEORITIS**

### **Kebijakan Publik**

Menurut Mustopadidjaja (2002), Kebijakan Publik merupakan keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Konsep kebijakan publik juga dikemukakan oleh Young dan Quinn, (2002:5-6) dalam Suharto (2008:44) menyebutkan :

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan Publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun beberapa perwakilan pemerintah.

### **Pengembangan Kawasan**

Pengembangan wilayah (kawasan) menurut Nurzaman (1997:2) adalah semua usaha yang dengan sadar merencanakan pengembangan daerah ditinjau dari berbagai segi sebagai satu kesatuan, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hubungan manusia dan alamnya. Sedangkan kawasan yang dimaksud sesuai dengan BAB Ketentuan Umum Perda Nmor. 6 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, adalah wilayah yang mempunyai fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, sedangkan

---

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Berbagai aktifitas yang dapat dilakukan di kawasan pesisir (pertambahan) dalam kaitannya dengan pengembangan kawasan strategis dan pembangunan ekonomi (Sondita, 2001:9) meliputi:

A. Perencanaan Wilayah, antara lain:

- 1) kajian lingkungan pesisir dan pemanfaatannya,
- 2) penentuan zonasi pemanfaatan ruang,
- 3) pengaturan proyek-proyek pembangunan pesisir dan kedekatannya dengan garis pantai,
- 4) penyuluhan masyarakat untuk apresiasi terhadap kawasan pesisir/lautan,
- 5) pengaturan akses umum terhadap pesisir dan lautan.

B. Pembangunan Ekonomi, antara lain:

- 1) industri perikanan tangkap,
- 2) perikanan rakyat,
- 3) wisata massal dan ekowisata, wisata bahari,
- 4) perikanan budidaya,
- 5) perhubungan laut dan pembangunan pelabuhan,
- 6) pertambangan lepas pantai,
- 7) penelitian kelautan dan akses terhadap sumberdaya genetika.

### **Kawasan Strategis**

Pengertian kawasan strategis menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, dalam BAB V Pasal 67 Tentang Penetapan Rencana Kawasan Strategis, merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap: tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain dibidang yang sejenis dan kegiatan dibidang lainnya, dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, soaial, budaya, dan/atau lingkungan. Yang termasuk kawasan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi antara lain

---

adalah Siborian (Jabon-Sidoarjo-Krian) sebagai kawasan agropolitan pertanian dan perikanan, serta untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di pantai timur sidoarjo (diantaranya Kecamatan Jabon).

### **Kawasan Agropolitan**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem pemukiman dan sistem agrobisnis.

Friedmann dalam Syahrani (2001), menyatakan bahwa di dalam wilayah agropolitan disediakan berbagai fungsi layanan untuk mendukung berlangsungnya kegiatan agribisnis. Fasilitas pelayanan meliputi sarana produksi (pupuk, bibit, obat-obatan, peralatan), sarana penunjang produksi (lembaga perbankan, koperasi, listrik), serta sarana pemasaran (pasar, terminal angkutan, sarana transportasi). Menurut definisi Depkimpraswil, agropolitan mengandung pengertian pembangunan suatu wilayah tertentu yang berbasis pada pertanian. Depkimpraswil memiliki kepentingan dalam penyediaan sarana dan prasarana, sementara Deptan bertanggungjawab terhadap aspek produksi pertanian.

Masih menurut Friedmann bersama Douglas (Mercado, 2002), menyebutkan bahwa karakteristik agropolitan meliputi 1) skala geografi relatif kecil, 2) proses perencanaan dan pengambilan keputusan bersifat otonom dan mandiri berdasarkan partisipasi masyarakat lokal, 3) diversifikasi tenaga kerja pedesaan pada sektor pertanian dan non pertanian, menekankan pada pertumbuhan industri kecil, 4) adanya hubungan fungsional industri pedesaan-perkotaan dan linkages dengan sumberdaya ekonomi lokal, dan 5) pemanfaatan dan peningkatan kemampuan sumberdaya dan teknologi lokal.

### **Kemiskinan**

Kemiskinan berasal dari kata “miskin” berarti tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Frank Ellis (Suharto, 2005) mendefinisikan bahwa kemiskinan memiliki berbagai dimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosio-psikologis.

---

## **Kemiskinan Sosial**

Menurut Widodo (2006), kemiskinan social merupakan salah satu dimensi dari kemiskinan itu sendiri, yang mempunyai makna kemiskinan yang terjadi karena kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapat kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Dengan kata lain kemiskinan yang disebabkan adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia. Senada dengan kemiskinan, menurut Tayib (2013) dijabarkan dalam kemiskinan struktural, yaitu sebuah kemiskinan yang hadir dan muncul bukan karena takdir, bukan karena kemalasan, atau keturunan. Namun kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang muncul dari suatu usaha pemiskinan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menghasilkan data deskriptif, karena bermaksud untuk mendalami dan menghayati suatu obyek. Bagdan dan Taylor (Moleong, 1993:3), mendefinisikan metode kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selain itu penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menilai dan mengungkapkan permasalahan mengenai apa adanya (das sein) sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan (Anis, 2014:54). Pengumpulan data dilakukan melalui kuisisioner, dokumentasi, wawancara dan observasi. Selanjutnya data dianalisis menggunakan model Miles and Huberman yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*.

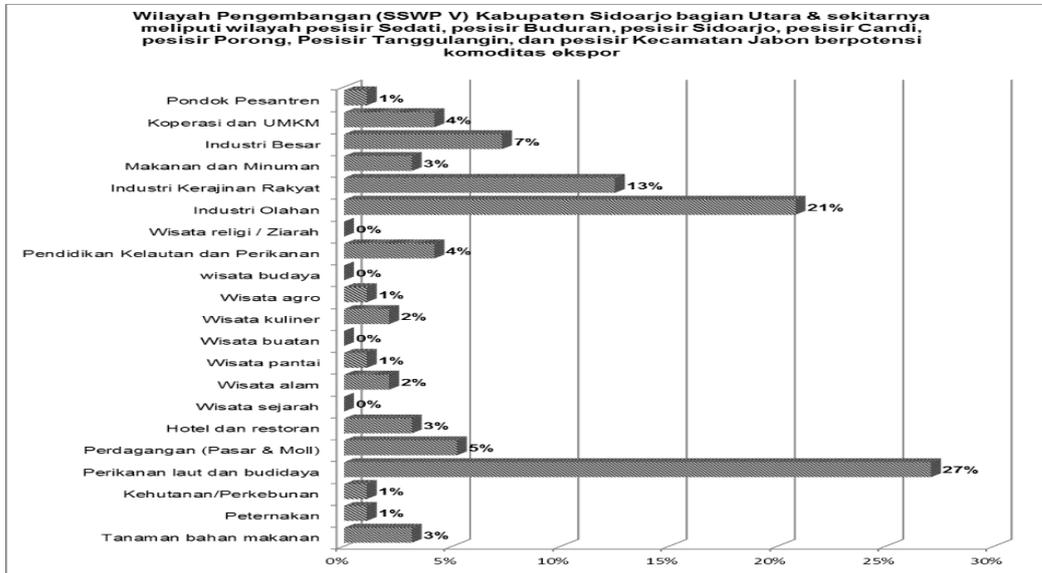
## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Pengembangan Kawasan Strategis Agropolitan Di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo**

Kecamatan Jabon terdiri dari 15 desa, dengan jumlah penduduk 55.228 jiwa atau 13.894 Kepala Keluarga (KK). Sebanyak 2.265 KK dikategorikan sebagai Pra Sejahtera (Kecamatan Jabon Dalam Angka, 2014). Mata pencaharian utama adalah sebagai petani tambak, selain itu kecamatan ini mempunyai sejumlah potensi sumberdaya alam yang tidak dimiliki oleh kecamatan lain, yaitu penghasil rumput laut *Gracelaria*, pertambakan bandeng, kepiting dan windu, serta pasir. Hal ini terlihat dalam Gambar 1 dibawah ini, bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat pertambakan di Kabupaten Sidoarjo, khususnya Kecamatan Jabon, ada di sektor perikanan dan budidaya.

---

**Gambar 1.**  
**Komoditas Yang Dijadikan Mata Pencaharian**

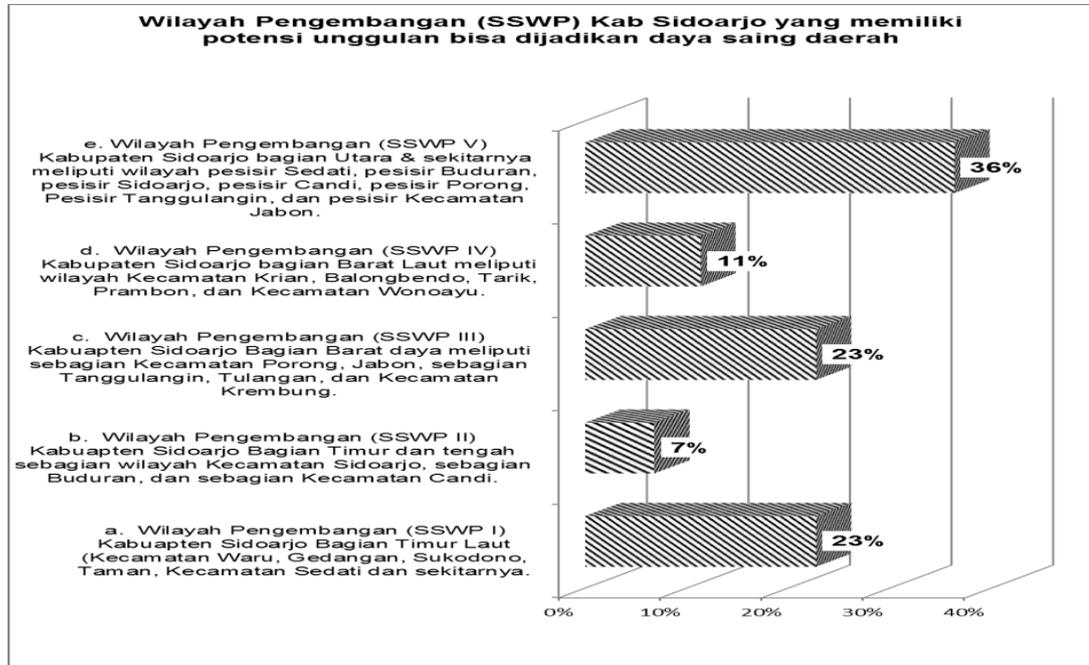


Sumber : Zonasi Eko Tek Sos Bud Par (SiDa), 2016.

Kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan di Kecamatan Jabon diantaranya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati Sidoarjo. Pemanfaatan ruang dilaksanakan secara sinergis antara RTRW dengan peraturan perundangan lainnya yang terkait. Penataan ruang dilakukan secara terus menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kecamatan Jabon bersama kecamatan lain, yaitu Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Krian merupakan pengembangan kawasan strategis agropolitan pertanian dan perikanan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang dikenal dengan istilah “SIBORIAN” (Sidoarjo-Jabon-Krian) sesuai dengan Gambar 2. Kawasan Agropolitan yang dimaksud adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem pemukiman dan sistem agrobisnis. Sesuai Pasal 76 Bagian Kesepuluh dalam RTRW ini, kawasan agropolitan pertanian dan perikanan mempunyai komoditi unggulan udang windu dan bandeng. Selain menjadi kawasan strategis agropolitan pertanian dan perikanan, Kecamatan Jabon adalah wilayah yang mendapat prioritas pelayanan air bersih yang masuk dalam program sistem jaringan prasarana pengairan dan kawasan perikanan.

**Gambar 2.**  
**Pembagian Wilayah Pengembangan**



Sumber : Zonasi Eko Tek Sos Bud Par (SiDa), 2016.

Pengembangan kawasan Agropoiltan didasarkan pada sektor dan subsektor prioritas, serta ditinjau dari urgensi dan tingkat permasalahan, maka disusunlah komponen pengembangannya sebagai berikut ; a) Pengembangan sektor perikanan (subsistem agro input, agro proses, dan agro output), b) Pengembangan kawasan (struktur kawasan, zonasi kawasan, sistem transportasi, dan sarana prasarana kawasan). Pendekatan dan prinsip pengolahan yang digunakan adalah pendekatan intersektoral holistik, pendekatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, dan pendekatan lingkungan. Dasar dari pengembangan kawasan strategis ini adalah dengan membagi wilayah yang berhubungan secara fungsional dalam suatu sistem kegiatan yaitu ; 1) sebagai pusat pengumpul dan pemasar, 2) sebagai kawasan pusat pertumbuhan, adn 3) kawasan pertanian.

Pengembangan ekonomi lokal pada Kecamatan Jabon dioptimalkan pada hasil produksi perikanan budidaya yang unggul. Potensi pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Jabon adalah ; a) tersedianya sumberdaya perikanan budidaya unggul dengan ketersediaan tenaga kerja cukup besar, serta wilayah pemasaran yang luas, b) Terdapat usaha pengolahan hasil perikanan. Upaya pengelolaan kawasan perikanan ini dilakukan dengan: 1). Melindungi kawasan tambak yang ada dari perkembangan kegiatan industri dan permukiman; 2). Mengendalikan laju perubahan penggunaan lahan dari tambak menjadi permukiman atau industri; 3). Melindungi kawasan perikanan tambak maupun sungai dari pencemaran oleh

limbah industri; 4). Budidaya tambak diarahkan pada daerah yang telah ditentukan dengan memperhatikan kawasan pantai; 5). Kawasan tambak yang berbatasan dengan sungai harus memperhatikan sempadan sungai, demikian juga bila berbatasan dengan pantai; 6). Pengembangan kawasan tambak perlu diimbangi dengan peningkatan normalisasi saluran dan jalan menuju lokasi tambak.

Masih termuat dalam RTRW dalam Bab VIII tentang Peran Masyarakat, dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk: 1). Mengetahui rencana tata ruang; 2). Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; 3). Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang; 4). Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang diwilayahnya; 5). Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai.

Kebijakan yang dituangkan dalam RTRW No. 6 Tahun 2009-2029 merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam membangun Kecamatan Jabon dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Dalam penyusunan kebijakan tersebut tentu saja pemerintah berangkat dari permasalahan ataupun potensi yang ada untuk digunakan sebagai jawaban masalah, supaya mampu menjadi kelebihan maupun kekuatan daerah sebagai pengangkat taraf kehidupan masyarakat, yang otomatis akan bisa mengentaskan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan pendapat Titmuss (1974) dalam Suharto (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.

### **Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.**

Dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan ini, pemerintah dan masyarakat banyak mengalami kendala dalam pelaksanaannya, serta belum bisa merasakan secara menyeluruh manfaatnya sebagaimana yang tergambarkan di RTRW Kabupaten Sidoarjo dan Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Kendala tersebut bisa ditemui di berbagai bidang berikut:

#### **A. Sarana dan Prasarana**

1. Akses jalan raya menuju pertambakan yang tidak menyebrangi sungai belum memadai, kondisi jalan rusak dan sebagian besar berupa tanah. Jika musim hujan akan banyak genangan serta licin bahkan cenderung
-

pengendara yang lewat akan terperosok, sebaliknya jika musim kemarau, debu akan berterbangan menutupi jalan dan udara.

2. Tidak ada transportasi umum menuju daerah pertambangan baik berupa angkutan maupun ojek motor.
3. Jika menuju desa penghasil rumput laut, jalan sempit hanya bisa dilewati dengan motor, dan aliran listrik baru dua tahun ini terpasang.
4. Penyediaan air bersih belum terpenuhi di semua wilayah Jabon.
5. Ada beberapa dusun yang belum teraliri listrik, diantaranya Dusun Kalisogo

#### B. Pendidikan

1. Terbatasnya jumlah sekolah di tiap desa dan jika akan melanjutkan ke tingkat pertama atau tingkat atas harus ke kota kecamatan.
2. Sarana prasarana sekolah yang jauh dari standar pembelajaran, gedung sekolah yang masih terbuat dari kayu serta perangkat pembelajaran tidak lengkap.
3. Kemampuan ketrampilan dalam proses belajar mengajar guru belum sesuai dengan standar kompetensi umum.
4. Banyak anak kecil yang tidak mengenyam pendidikan PAUD.
5. Tingkat pendidikan masyarakat tergolong rendah.

#### C. Kesehatan

1. Sarana kesehatan masih berada di pusat kecamatan, untuk sampai ke dusun terpencil masih mengalami kesulitan karena akses menuju dusun terbatas dan tidak terlalu bagus.
2. Terbatasnya peralatan kesehatan dalam jumlah dan variannya.
3. Kesadaran hidup bersih masih belum ada, usaha sosialisasi yang dilakukan pemerintah sering terkendala karena minimnya kader kesehatan di desa-desa.
4. Ada beberapa wilayah di Kecamatan Jabon yang belum tersalurkan air bersih untuk konsumsi rumahtangga dan mandi cuci kakus (MCK).
5. Sanitasi masih belum membudaya, masyarakat cenderung memanfaatkan keadaan yang ada.
6. Pemahaman tentang kesehatan, diantaranya macam-macam penyakit yang rentan penularan atau tidak, cara-cara penyembuhan penyakit ringan masih sangat terbatas.

#### D. Ekonomi Sosial

1. Terdapat penguasa atau tengkulak besar tambak, sehingga penduduk tidak bisa menjual hasil tambaknya ke berbagai tempat.
  2. Para pejabat pabrik tidak bisa masuk leluasa ke desa penghasil tambak, karena sudah dihadang oleh penguasa desa.
-

3. Dana bantuan pemerintah hanya sampai pada desa tertentu karena adanya penguasa desa.
4. Adanya kesenjangan sosial yang mencolok antara desa-desa yang dekat dengan pemerintahan kecamatan dengan desa-desa yang berada di pinggiran tambak.
5. Masyarakat dalam memasarkan hasil pertambakan belum bisa optimal, karena jalur distribusi dan saluran pemasaran masih terbatas.
6. Karena ketidakmandirian sebagian masyarakat Kecamatan Jabon, sehingga mudah sekali ditindas oknum yang mempunyai kekuasaan.
7. Pendapatan masyarakat dari sektor pertanian dan pertambakan masih tergolong rendah, karena sebagian besar mereka hanya sebagai buruh tani maupun buah tambak.
8. Adanya kelompok-kelompok tani yang sering saling tidak sejalan.

#### E. Lingkungan

1. Di beberapa garis tambak dan garis pantai tanaman mangrove mulai menghilang.
2. Struktur tanah yang kering disekitar pertambakan membuat pemanfaatannya belum optimal, masyarakat belum mengetahui cara pemanfaatan lahan kering.

#### F. Pelayanan Pemerintahan

1. Kurangnya komunikasi yang intens antara aparat desa dengan masyarakat di beberapa desa pinggiran.
2. Musyawarah desa yang difasilitasi pemerintah sering mengalami jalan buntu.

## SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

- a. Kebijakan pemerintah tentang pengentasan kemiskinan dan pengembangan kawasan strategis agropolitan di Kecamatan Jabon, yang diantaranya tertuang dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo No. 8 Tahun 2009-2029 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia No 32/KEPMEN-KP/2010, sudah mencakup semua aspek yang mendukung kemandirian dan pengembangan ekonomi masyarakat, seperti pengembangan prasarana pengairan air bersih, mengembangkan kawasan agropolitan pertanian dan perikanan, serta kawasan budidaya. Namun demikian dalam melakukan pengembangan kawasan ini masih menemukan kendala dalam pelaksanaannya, yaitu kurang maksimalnya kesadaran masyarakat, pemerintah, dan swasta disertai dengan kegiatan pengolahan yang masih sederhana.
-

- b. Faktor penghambat dalam melakukan pengentasan kemiskinan antara lain:
    - 1) Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah baik ditingkat pusat sampai desa, banyak yang belum dilakukan secara menyeluruh.
    - 2) Dari segi masyarakat, masih banyak yang belum mempunyai kesadaran akan potensi sumberdaya wilayah yang mereka punyai.
    - 3) Dalam sektor pendidikan, sarana prasarana yang berhubungan dengan proses belajar mengajar jauh dari standar pendidikan. Tenaga pendidik masih ada yang belum sesuai kompetensi yang ditentukan.
    - 4) Untuk bidang kesehatan, jumlah tenaga kesehatan yang harus melayani sampai ke pelosok pesisir masih kurang. Dalam ranah pelayanan publik, pemerintah kecamatan sampai desa di beberapa tempat terutama yang jangkauannya jauh dari kecamatan, pelayanan yang diberikan masih belum optimal.
2. Saran
- a. Pemerintah daerah perlu melengkapi fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan sarana prasarana pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan kawasan strategis agropolitan. Dalam merealisasikan pembangunan hendaknya melibatkan berbagai *stakeholder* (pemerintah, swasta, masyarakat dan CSR).
  - b. Pemerintah kecamatan sampai desa hendaknya menambah komitmen untuk membangun komunikasi dan kerjasama sesuai dengan kebijakan yang telah diatur, sehingga intensitas komunikasi dalam melayani masyarakat terbangun dan mempersempit penguasa-penguasa kecil yang muncul di desa. Bersama seluruh *stakeholder* harus menumbuhkan komitmen untuk membangun dan mengembangkan secara proporsional sumberdaya alam maupun buatan yang ada di Kecamatan Jabon sebagai dasar pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anis, F. & Kandung, S. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Nomor 32/KEPMEN-KP/2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.
- Kusnadi. (2006). *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029.
- Suharto, E. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
-

Syahrani, H.A.A. (2001). *Penerapan Agropolitan dan Agrobisnis dalam Pembangunan Ekonomi Daerah*. Frontir (universitas Mulawarman). Nomor 33, Maret 2001.

Tayib, Muhtar. (2013). *Penyebab Kemiskinan Masyarakat di Pedesaan*. <http://muhtartayib.b;ogspot.co.id/2013/11/penyebab-kemiskinan-masyarakat-di-pedesaan>

Widodo, J & Suadi. (2006). *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Internet), Diakses dari: [http://undang\\_undang\\_nomor-26-tahun-2007-ttg-penataan-ruang.pdf](http://undang_undang_nomor-26-tahun-2007-ttg-penataan-ruang.pdf). (akses 14 Februari 2013).

---